

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PINJAMAN DAERAH,  
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL  
PEMERINTAH DAERAH.**

***THE EFFECT OF LOCAL ORIGINAL INCOME, PUBLIC DEBT TO  
SPECIFIC ALLOCATION FUND, WIDE AREA TOWARD THE  
ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURE.***

**NANDYA VIVI ARTANTRI  
8335098156**



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

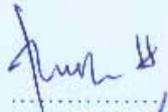
**Program Studi S1 Akuntansi  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Jakarta  
2013**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab  
Dekan Fakultas Ekonomi**



Dra. Nurahma Hajat, M.Si  
NIP. 19531002 198503 2 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Ketua Penguji		1 Juli 2013
2. <u>Choirul Anwar, SE, MBA, MAFIS, CPA</u> NIP. 19691004 200801 1 010	Sekretaris		3 Juli 2013
3. <u>Yunika Murdayanti, SE., M.Si, M.Ak</u> NIP. 19780621 200801 2 011	Penguji Ahli		1 Juli 2013
4. <u>Dra. ETTY Gurendrawati, SE, Akt, M.Si</u> NIP. 19680314 199203 2 002	Pembimbing I		1 Juli 2013
5. <u>Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si</u> NIP. 19760425 200112 2 002	Pembimbing II		1 Juli 2013

Tanggal Lulus 26 Juni 2013

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan Karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2013  
Yang membuat pernyataan



Nandya Vivi Artantri  
8335098156

## ABSTRAK

*Nandya Vivi Artantri, 2013: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal.; Pembimbing I ; Dra. Ety Gurendrawati, SE, Akt, M.Si , Pembimbing II ; Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal melalui tes secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Depertemen Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2009 dan 2010. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data laporan realisasi anggaran penerimaan dan belanja daerah untuk tahun 2009 dan 2010. Jumlah sampel yang terkumpul adalah dua puluh delapan (28) pemerintah daerah yang telah memenuhi kriteria purposive sampling yang digunakan peneliti. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda.*

*Penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah negatif tidak signifikan secara statistik terhadap alokasi belanja modal. Dan pinjaman daerah berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan untuk luas wilayah positif tidak signifikan secara statistik terhadap alokasi belanja modal. Uji simultan membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, dan Luas Wilayah signifikan berpengaruh positif secara statistik terhadap alokasi belanja modal.*

*Kata kunci: pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, luas wilayah, alokasi belanja modal.*

## ABSTRACT

*Nandya Vivi Artantri, 2013: The Effect Of Local Original Income, Public Debt To Specific Allocation Fund and Wide Area Toward The Allocation Of Capital Expenditure.; 1<sup>st</sup> Advisor ; Dra. Etty Gurendrawati, SE, Akt, M.Si , II<sup>st</sup> Advisor ; Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si.*

*This research aims to examine the effect of local original income, public debt to specific allocation fund, wide area toward the allocation of capital expenditure through simultaneously and partial test. This research using the secondary data obtained from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Depertemen Keuangan Republik Indonesia the website for the year of 2009 and 2010. Data that collected in this research include the realization report of the estimate income of regional expense (APBD) for the year 2009 and 2010. Numbers of sample used in this research is twenty eight (28) local governments which is has been passed the purposive sampling used by researcher. From the data collected, then processed and analyzed using multiple regression analysis.*

*This research proved that there's an negative not significant the effect of local original income and specific allocation fund toward the allocation of capital expenditure. There's an positive significant influence between public debt and specific allocation fund toward the allocation of capital expenditure. There's an positive significant influence wide area toward the allocation of capital expenditure. The result shows that Effect Of Local Original Income, Public Debt To Specific Allocation Fund, and Wide Area will affect simultaneously to the specific allocation fund toward the allocation of capital expenditure.*

*Keywords: effect of local original income, public debt to specific allocation fund, wide area, the allocation of capital expenditure...*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal”**. Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Keberhasilan menyelesaikan proposal skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada .:

1. Dra. Nurahma Hajat, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak Unggul Purwohedi, SE, M.Si, PhD, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Ibu Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
4. Ibu Dra. Ety Gurendrawati, SE, Akt, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan yang sangat berarti untuk keberhasilan penulisan proposal ini serta dengan sabar membimbing untuk kesuksesan penulisan proposal ini.
5. Ibu Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak membantu dan meluangkan waktu dan dengan sangat teliti membaca setiap detail proposal penulis untuk memberikan masukan kepada penulis.

6. Aryo Anggoro Bismo selaku teman yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini.
7. Mia Puspita Rani selaku kakak ku tersayang yang telah banyak membantu serta Anggia Fardianti dan adik-adik ku tercinta yaitu arin dan anisa.
8. Teman-teman S1 Akuntansi non reg 2009 khusus nya Wulantika Oktariani, Baiti Izzatinisa, Tami Yoseva, Intan Purnama dan Irene mareta dan Theodora Hastarini yang telah banyak memberikan dukungan.
9. Orang tua tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan moril maupun materil.
10. Seluruh dosen FE UNJ yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk dibangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Maret 2013

Nandya Vivi Artantri

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Orisinalitas</b> .....	<b>iii</b>
<b>Abstrack</b> .....	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>Bab II Kajian Pustaka Kerangka pemikiran dan Hipotesis</b> .....	<b>8</b>
2.1 Kajian Pustaka .....	8
2.1.1 Pemerintah Daerah .....	8
2.1.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah .....	9
2.1.2 Belanja Daerah dengan Belanja Modal .....	11
2.1.3 Pendapatan Daerah dengan PAD .....	14
2.1.3 Pinjaman Daerah .....	22
2.1.3 Luas Wilayah .....	25
2.2 <i>Review</i> Penelitian Yang Relevan .....	27
2.3 Kerangka Pemikiran .....	29
2.4 Perumusan Hipotesis .....	31
<b>Bab III Objek dan Metodologi Penelitian</b> .....	<b>33</b>
3.1 Objek dan Ruang lingkup penelitian .....	33
3.2 Metode penelitian .....	33
3.3 Operasionalisasi Variabel penelitian .....	34
3.4 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel .....	36
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	37
3.6 Metode Analisis .....	37
3.6.1 Statistik Deskriptif .....	37
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik .....	38
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....	41
3.6.4 Uji Hipotesis .....	41
<b>Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan</b> .....	<b>43</b>
4.1 Deskripsi Unit Analisis / Observasi .....	43
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	44
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	44

4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	48
4.2.2.1 Uji Normalitas .....	48
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas .....	51
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	52
4.2.2.4 Uji Autokorelasi .....	53
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	54
4.4 Pengujian Hipotesis .....	56
4.4.1 Uji Statistik t dan F .....	56
4.4.2 Uji koefisien determinasi .....	59
4.5 Pembahasan .....	60
4.5.1 PAD Mempengaruhi Belanja Modal .....	60
4.5.2 Pinjaman Mempengaruhi Belanja Modal.....	62
4.5.3 Luas Wilayah Mempengaruhi Belanja Modal.....	63
4.5.4 PAD, Pinjaman Daerah dan Luas Wilayah Mempengaruhi Luas Wilayah Mempengaruhi Belanja Modal .....	63
<b>Bab V Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	69
5.3 Keterbatasan .....	69

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Review Penelitian Terdahulu	28
4.1	Kriteria Pemilihan Sampel	43
4.1	Nama Sampel Pemerintah Daerah	63
4.2	Statistik Deskriptif	44
4.3	Hasil Uji Normalitas skewness dan Kurtosis	49
4.4	Hasil Uji Normalitas Kormogorov Smirnov	51
4.5	Hasil Uji Multikolinearitas	52
4.6	Hasil Uji Heterokedastisitas Gletser	53
4.7	Hasil Uji Autokorelasi	53
4.8	Regresi Linear Berganda	54
4.9	Hasil Uji statistik t	57
4.10	Hasil Uji statistik F	59
4.11	Hasil Uji Koefisien determinasi	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	30
4.4	Hasil Uji Normalitas P-Plot	50

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Nama Sampel Pemerintah Daerah	72
2	Statistik Deskriptif	74
3	Hasil Uji Normalitas skewness dan Kurtosis	74
4	Hasil Uji Normalitas P-Plot	75
5	Hasil Uji Normalitas Kormogorov Smirnov	75
5	Hasil Uji Multikolinearitas	76
6	Hasil Uji Heterokedastisitas Gletser	76
7	Hasil Uji Autokorelasi	76
8	Regresi Linear Berganda	77
9	Hasil Uji statistik t	77
10	Hasil Uji statistik F	77
11	Hasil Uji Koefisien determinasi	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak diberlakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah tahun 2001, Indonesia memasuki era otonomi. Menurut UU 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri dalam rangka otonomi daerah. Pelimpahan kewenangan ini membuat daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangannya masing-masing termasuk pengelolaan belanja modal untuk pembangunan.

Menurut Direktorat Jendral Anggaran, Department Keuangan RI di dalam situsnya memaparkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset dalam waktu satu periode akuntansi. Aset-aset inilah yang digunakan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal (Sulistyowati, 2011). Menurut Kompas yang diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2012, The Asia Foundation menyatakan lebih dari 80 persen dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hanya digunakan untuk belanja pegawai. Hal ini seakan-akan menggambarkan

anggaran untuk bidang lainnya cenderung terabaikan, sementara dengan adanya belanja modal, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada publik. Sehingga pada akhirnya akan menguntungkan kembali daerah tersebut. Menurut Kompas yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2011, *staff* khusus Menteri Perencanaan mengatakan bahwa bila alokasi belanja modal diperbesar, maka akan meningkatkan sisi perekonomian daerah yang mana akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik.

Adanya otonomi membuat suatu daerah melakukan pengelolaan anggaran yang mana salah satu sumber penerimanya adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat (Halim, 2002). Menurut UU No. 3 Tahun 2004 salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya (Sulistiyowati, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa PAD bertujuan pula untuk mendanai belanja daerah. Menurut Rizanda, 2010 pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah.

Semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu daerah, maka semakin tinggi pula nilai kekayaan bersih yang diakui oleh pemerintah daerah. Hal ini mengacu pada UU No 33 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan. Sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan daerah. Semakin tinggi Pendapatan daerah, maka akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah. Kondisi seperti ini dapat menggambarkan besarnya peluang pemerintah dalam meningkatkan belanja untuk kebutuhan sarana dan prasarana yang merupakan bagian dari belanja modal.

Selain PAD, sumber lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai pemerintah daerah adalah pinjaman daerah (Sumarni , 2010). Menurut UU 33 tahun 2004 pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penggunaan pinjaman daerah dapat meningkatkan beban pemerintah. Hal ini dikarenakan munculnya beban untuk pembayaran bunga. Sehingga mengharuskan pemerintah mengalokasikan sebagian anggarannya untuk pembayaran kembali pinjaman dan beban bunga yang timbul atas pinjaman tersebut. Meningkatnya tambahan pembiayaan aset dari pinjaman dapat mempermudah pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal, tetapi hal ini juga dapat meningkatkan resiko keuangan di masa mendatang. Hal ini merujuk pada pernyataan Bringham dan Houston (2011) yang menyatakan bahwa penggunaan pinjaman pada umumnya akan meningkatkan pengembalian suatu investasi tetapi juga akan meningkatkan risiko bagi peminjam. Lora dan Mauricio (2006) juga mengungkapkan bahwa secara

jangka panjang pinjaman daerah akan mengganggu keuangan daerah tersebut karena semakin banyak pinjaman daerah maka akan banyak membutuhkan alokasi untuk pembayaran hutang serta bunganya yang akan menyebabkan alokasi belanja untuk kebutuhan lain akan terganggu. Kondisi ini akan menuntut pemerintah daerah untuk menargetkan hal-hal yang menjadi prioritas dalam belanja salah satunya belanja modal. Oleh karena itu pinjaman daerah diduga dapat mempengaruhi belanja modal.

Tidak hanya PAD dan pinjaman daerah, luas wilayah diperkirakan juga dapat memberikan dampak terhadap belanja modal. Menurut Adisasmita (2011) luas wilayah diartikan sebagai suatu permukaan luas yang dihuni manusia yang melakukan interaksi kegiatan dengan sumber modal, sumber daya pembangunan lainnya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakatnya. Daerah yang memiliki luas wilayah yang lebih besar, diduga dapat meningkatkan peluang pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang lebih besar. Hal ini dikarenakan daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah yang wilayahnya tidak begitu luas (Siswanto, 2012). Besar kecilnya sarana dan prasarana membutuhkan dukungan dari anggaran belanja modal yang memadai.

Penelitian ini tidak hanya terfokus untuk melihat hubungan satu – satu antar variable independen dan dependen tetapi juga akan melihat hubungan secara bersama-sama diantara variable tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan untuk melihat hubungan antara belanja modal terhadap PAD, pinjaman daerah dan luas wilayah baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siswanto (2012) yang menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Silpa, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada penambahan variable pinjaman daerah. Adapun periode tahun yang digunakan adalah 2009-2010. Penelitian menggunakan periode yang lebih panjang sesuai dengan saran peneliti terdahulu.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal Studi Kasus Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2009-2010”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal?
2. Apakah terdapat pengaruh pinjaman daerah terhadap belanja alokasi modal?
3. Apakah terdapat pengaruh luas wilayah terhadap alokasi belanja modal?
4. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
2. Untuk mengetahui apakah pinjaman daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
3. Untuk mengetahui apakah luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
4. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

#### **1. Bidang Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan hubungan antar variabel secara empiris di lapangan dari konsep-konsep yang ada sehingga mampu mendukung pengembangan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, pinjaman dan luas wilayah terhadap anggaran belanja modal

#### **2. Bidang Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja

modal serta menjadi pembelajaran evaluasi untuk pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan akan saran dan prasarana di daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pemerintah Daerah**

Menurut UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat (Renyowijoyo 2010).

Sementara itu menurut Permendagri No.13 tahun 2006 pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Menurut UU No. 58 tahun 2005 dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah. UU No.32 tahun 2004 dalam Renyowijoyo (2010) menyatakan dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak dan kewajiban, yaitu:

- a. Hak-hak Pemerintah daerah
  - 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
  - 2) Memilih pimpinan daerah

- 3) Mengelola aparatur Negara
  - 4) Memungut pajak daerah dan retribusi
  - 5) Mendapatkan dana bagi hasil dari pengelolaan
  - 6) Mendapatkan sumber pendapatan lainnya yang syah
  - 7) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- b. Kewajiban pemerintah daerah
- 1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional Negara kesatuan republic Indonesia
  - 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
  - 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi
  - 4) Mewujudkan keadilan pemerataan
  - 5) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

Hak dan Kewajiban daerah sebagaimana yang dimaksud diatas diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

#### **2.1.1.1 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah sebagaimana yang ditetapkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan daerah (Renyowijoyo, 2010). Wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun disebut Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah atau dikenal dengan istilah APBD (UU No. 17 tahun 2003).

Menurut Wajong (1962:81) dalam Halim (2002:16) APBD merupakan rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk jangka waktu tertentu dalam waktu yang mana badan legislative (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar untuk melakukan pembiayaan rumah tangga. Mamesah (1995:20) dalam Halim (2002:16) mendefinisikan APBD sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana disuatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu.

APBD memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur APBD menurut Halim (2002) yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci
- b. Adanya sumber-sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut dan adanya biaya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan
- c. Jenis kegiatan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- d. Periode anggaran biasanya 1 (satu) tahun.

Sementara itu perubahan APBD dapat terjadi jika:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi kegiatan, dan jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran yang berjalan

### **2.1.2 Belanja Daerah kaitannya dengan Belanja Modal**

Belanja daerah menurut UU 33 tahun 2004 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Halim (2002) Belanja dalam akuntansi pemerintahan menurut karakteristiknya diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu belanja modal (belanja pembangunan) dan belanja selain modal (contoh: belanja administrasi umum, belanja transfer, dll).

Sedangkan menurut Permen No.13 2006, klasifikasi belanja daerah dibagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat dalam Permen No.13 adalah terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Sementara itu Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Permen No. 13 tahun 2006 dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam permendagri 13 tahun 2006 digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.02/2011 belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

A. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban

atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

B. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

C. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual)

D. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan

#### E. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat

#### F. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU

### 2.1.3 Pendapatan Daerah kaitannya dengan PAD

Menurut undang-undang 33 tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. sumber pendapatan daerah terdiri dari , pendapatan asli daerah (pad), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah

Menurut Deddi, Iswahyudi, Maulidah (2007), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Sementara itu menurut undang-undang 33 tahun 2004 , PAD

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu , Pajak Daerah , Retribusi Daerah , hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

#### **2.1.3.1 Pajak Daerah**

Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut undang-undang no 28 tahun 2009, jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yaitu :

##### **A. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya

##### **B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

#### C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

#### D. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

#### E. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

#### F. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan

dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

#### G. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

#### H. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

#### I. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

#### J. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

#### K. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

#### L. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

#### M. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

#### N. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

#### O. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

#### **2.1.3.2 Retribusi daerah**

Retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Besaran dan jumlah retribusi daerah biasanya sudah diatur dalam Surat Ketetapan Retribusai Daerah. Retribusi dibagi menjadi tiga, yaitu:

##### A. Objek Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Objek retribusi ini

terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan lain-lain. Namun, jenis retribusi tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

#### B. Objek Retribusi Jasa Usaha

Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Objek retribusi ini terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, dan-lain-lain.

#### C. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi ini terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

#### **2.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Untuk jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana menurut obyek pendapatan yaitu Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **2.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Menurut Anggraini (2010:131) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencakup :

- A. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- B. Jasa giro;
- C. Pendapatan bunga;
- D. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- E. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
- F. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

- G. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- H. Pendapatan denda pajak
- I. Pendapatan denda retribusi
- J. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- K. Pendapatan dari pengembalian
- L. Fasilitas social dan umum
- M. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan
- N. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

#### **2.1.4 Pinjaman Daerah**

Renyowijoyo (2010) menyatakan bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Menurut undang-undang 33 tahun 2004 Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah bersumber dari:

- A. Pemerintah;
- B. Pemerintah Daerah lain;
- C. Lembaga keuangan bank;
- D. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- E. Masyarakat

Sementara itu menurut PP No. 54 Tahun 2005 yang berganti menjadi PP No. 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, pinjaman daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :

A. Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

B. Pinjaman jangka Menengah

Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

C. Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Namun demikian , mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti yang dipaparkan dalam situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga resiko pembiayaan kembali, resiko kurs dan resiko operasional, maka menteri keuangan menetapkan syarat-syarat dalam melakukan pinjaman daerah. Dalam PP No. 30 tahun 2011 tercantum syarat-syarat daerah yang boleh melakukan pinjaman, yaitu :

- A. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- B. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) paling sedikit 2,5;
- C. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;
- D. Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang dilakukan dengan persetujuan DPRD.

Sementara itu penggunaan pinjaman oleh pemerintah daerah dalam pasal 33 tahun 2004, hanya diperbolehkan untuk :

- A. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- B. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

- C. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- D. Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

### **2.1.5 Luas Wilayah**

Dalam perencanaan pembangunan dikenal beberapa istilah atau konsep penting yang terkait dengan luasan permukaan dimana pembangunan dilaksanakan (Adisasmita, 2011:59). Wilayah diartikan sebagai suatu permukaan yang luas, yang dihuni manusia yang melakukan interaksi kegiatan dengan sumberdaya alam, sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, sumberdaya kelembagaan, dan sumberdaya pembangunan lainnya. Menurut UU No.33 2004 pasal 28, kebutuhan pendanaan daerah juga diukur dari wilayah yang dimiliki daerah yang bersangkutan.

Dalam Adisasmita (2011:60), P.Hadjisarosa (1980) menyatakan konsep atas wilayah dibedakan kedalam :

#### **A. Wilayah Administrasi**

Wilayah yang mempunyai batas wilayah pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah/peraturan daerah yang dikelompokkan kedalam wilayah propinsi, wilayah kabupaten dan wilayah kota.

## B. Wilayah Pengembangan

Wilayah yang luasan wilayahnya tidak ditetapkan berdasarkan batas wilayah administrasi tetapi batas-batasnya adalah secara fungsional berdasarkan kegiatan interaksi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, sumberdaya kelembagaan dan sumberdaya pembangunan lainnya.

Sementara itu klasifikasi wilayah dalam adisasmita (2011:75), Aristoteles menyatakan wilayah terdiri dari wilayah homogen, wilayah nodal atau wilayah polarisasi serta wilayah perencanaan atau wilayah program dianggap sebagai wilayah dasar yang kemudian dikembangkan menjadi macam jenis wilayah dan kawasan.

Sedangkan menurut para pakar dalam adisasmita (2011:78), John Friedmaan dan Willian Alonso menampilkan empat macam klasifikasi wilayah, yaitu :

### A. Metropolitan Area (Daerah Metropolitan)

Kota metropolitan yang berpenduduk diatas 10 juta sampai 20 juta jiwa. luasan kotanya sangat besar maka diperlukan ruang perkotaan secara mantap dan dinamis serta pemanfaatan lahan kota diatur secara tepat dan tertib

### B. Development Axis Region(Wilayah Poros Pembangunan)

Wilayah yang menggabungkan dua atau lebih kota besar yang dihubungkan oleh jalan arteri primer.

### C. Depressed Region (Wilayah Tertekan)

Wilayah yang tidak memiliki sumberdaya alam yang dapat dikembangkan untuk pembangunan daerahnya untuk memberikan pendapatan dan kehidupan yang layak bagi penduduknya.

### D. Frontier Region (Wilayah Perbatasan)

Wilayah yang penting bagi pembangunan dikarenakan terletak di bagian terluar atau perbatasan negara lain.

Sedangkan John Friedmann dalam Adisasmita (2011), memperkenalkan konsep wilayah inticore dan wilayah pinggiran (periphery region). Okun dan Richardson dalam Adisasmita (2011) juga memuat klasifikasi wilayah dengan menggunakan indikator tingkat kesejahteraan.

## **2.2 Review Penelitian Relevan**

Untuk mendukung penelitian ini, perlu adanya sebuah literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah terbukti dan sudah diuji. Penelitian tersebut adalah penelitian yang terkait dalam variable-variabel yang ada di penelitian ini seperti pajak daerah, retribusi daerah, luas wilayah dan belanja modal. Hasil tersebut terangkum dalam table dibawah ini.

Tabel 2.1  
Penelitian Relevan

Nama Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
Kusnandar & Dodik Siswanto (2012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU</li> <li>• PAD</li> <li>• SILPA</li> <li>• Luas Wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan DAU berpengaruh terhadap belanja modal, untuk uji parsial DAU berpengaruh tidak signifikan</li> <li>• PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal baik simultan atau pun parsial</li> <li>• SILPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal</li> <li>• Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.</li> </ul>
Diah Sulistyowati (2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Daerah</li> <li>• Retribusi Daerah</li> <li>• DAU</li> <li>• DAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal</li> <li>• Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal</li> <li>• DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal</li> <li>• DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal</li> </ul>
Saptaningsih Sumarni (2009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD</li> <li>• DAU</li> <li>• DAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal secara simultan, sementara secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.</li> <li>• DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sementara secara parsial DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal</li> <li>• DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal , sementara secara parsial DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal</li> </ul>
Rizanda Ratna (2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD</li> <li>• DAU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal</li> <li>• DAU berpengaruh terhadap belanja modal</li> </ul>

Eduardo Lora & Mauricio (2006)	• <i>Sosial Expenditure</i>	• <i>Public Debt</i>	• <i>Loans from multilateral organizations like the World Bankor the Inter-American Development Bank do not seem to ameliorate the adverse consequences of debt on social expenditures..</i>
--------------------------------	-----------------------------	----------------------	--

Sumber : Data Diolah Penulis (2013)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Dalam rangka pelimpahan kewenangan ini membuat daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangannya termasuk pengelolaan belanja modal. Salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai belanja modal adalah PAD. Menurut Halim (2002), PAD bagian dari pendapatan dalam APBD.

PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya (Sulistiyowati, 2011). Semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu daerah, maka semakin tinggi pula nilai kekayaan bersih yang diakui oleh pemerintah daerah. Hal ini mengacu pada UU No 33 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pendapatan daerah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan daerah. Semakin tinggi Pendapatan daerah, maka akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah. Kondisi seperti ini dapat menggambarkan

besarnya peluang pemerintah dalam meningkatkan belanja untuk kebutuhan sarana dan prasarana yang merupakan bagian dari belanja modal. Oleh karena itu PAD diduga dapat mempengaruhi belanja modal.

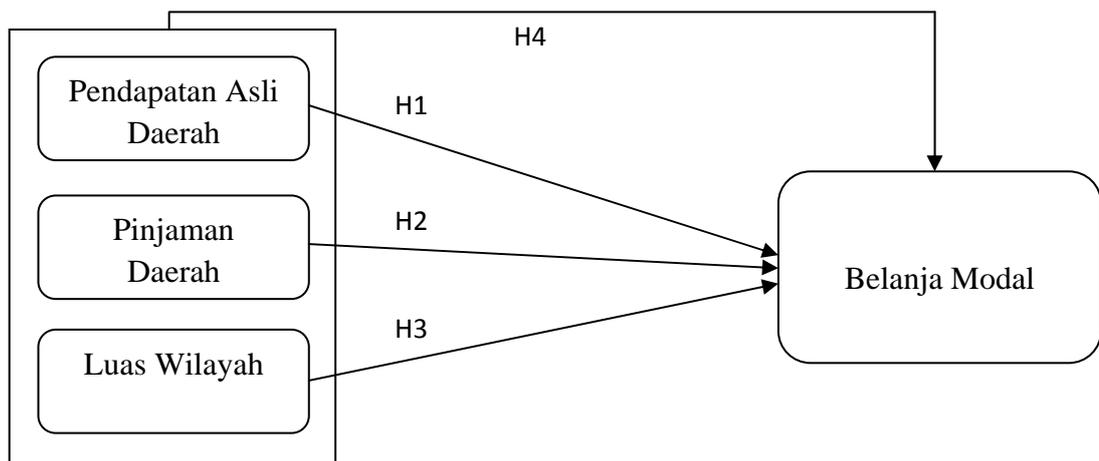
Selain PAD, sumber lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai pemerintah daerah adalah pinjaman daerah (Sumarni , 2009). Penggunaan pinjaman daerah dapat meningkatkan beban pemerintah. Hal ini dikarenakan munculnya beban untuk pembayaran bunga. Sehingga mengharuskan pemerintah mengalokasikan sebagian anggarannya untuk pembayaran kembali pinjaman dan beban bunga yang timbul atas pinjaman tersebut. Hal ini merujuk pada pernyataan Bringham dan Houston (2011) yang menyatakan bahwa penggunaan pinjaman pada umumnya akan meningkatkan pengembalian suatu investasi tetapi juga akan meningkatkan risiko bagi peminjam. Kondisi ini akan menuntut pemerintah daerah untuk menargetkan hal-hal yang menjadi prioritas dalam belanja salah satunya belanja modal. Oleh karena itu diperkirakan pinjaman daerah akan berpengaruh terhadap belanja modal.

Tidak hanya PAD dan pinjaman daerah, luas wilayah diperkirakan juga dapat memberikan dampak terhadap belanja modal. Daerah yang memiliki luas wilayah yang lebih besar, diduga dapat meningkatkan peluang pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang lebih besar. Hal ini dikarenakan daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas membutuhkan pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan

dengan daerah yang wilayahnya tidak begitu luas (Siswanto, 2012). Besar kecilnya sarana dan prasarana membutuhkan dukungan dari anggaran belanja modal yang memadai.

Penelitian ini merupakan penelitian yang akan meneliti pengaruh dari variabel independen dalam hal ini adalah pendapatan asli daerah, pinjaman dan luas wilayah daerah terhadap variabel dependen dalam hal ini alokasi belanja modal baik secara parsial maupun secara simultan.

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian



Sumber : Data Diolah Penulis (2013)

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiono (2007) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kajian pustaka dan review penelitian relevan yang telah diuraikan, maka hipotesis nya sebagai berikut:

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

H2: Pinjaman daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

H3: Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

H4: Pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

##### **3.1.1 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Adapun variabel yang diteliti ialah pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah.

##### **3.1.2 Periode Penelitian**

Penelitian ini meneliti dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal periode 2009-2010. Sumber data dalam penelitian ini adalah pos PAD dan pinjaman pada laporan realisasi anggaran.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Istijanto (2005 : 38) data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan merupakan oleh periset sendiri, dalam hal arti bahwa periset mencatat, mengakses atau meminta data tersebut kepada pihak yang telah mengumpulkan dilapangan .

### **3.3 Operasional Variable Penelitian**

Untuk meneliti hipotesis dalam penelitian ini, variable yang digunakan terbagi menjadi dua jenis yaitu variable dependen dan variable independen. Variable dependen yang digunakan adalah belanja modal sedangkan variabel independennya yaitu pendapatan asli daerah, pinjaman dan luas wilayah.

#### **3.3.1 Variable Dependent**

Menurut Sugiyono (2007:4), variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variable dependent yang digunakan adalah belanja modal.

a. Definisi Konseptual

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud dan mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan.

b. Definisi Operasional

Untuk pengukuran variable ini, dapat dilihat dari laporan realisasi pada pos belanja daerah yang mana di pos belanja daerah terdapat pos belanja modal sebagai perhitungan untuk variable belanja modal.

#### **3.3.2 Variable Independent**

Menurut Sugiyono (2007:4) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variable independen yang digunakan yaitu:

### **3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

#### a. Definisi Konseptual

PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah yang bersangkutan yang bertujuan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi daerah.

#### b. Definisi Operasional

Untuk pengukuran variable ini, dapat dilihat dari laporan realisasi pada pos pendapatan daerah yang mana di pos pendapatan daerah terdapat pendapatan asli daerah sebagai perhitungan untuk variable pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah pada pos realisasi anggaran yaitu terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **3.3.2.2 Pinjaman Daerah**

#### a. Definisi Konseptual

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sumber pembiayaan lain yang bernilai uang dan dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah tetapi mengakibatkan daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali..

#### b. Definisi Operasional

Untuk pengukuran variable ini, dapat dilihat dari laporan realisasi pada pos pinjaman daerah yang mana pos pinjaman daerah ini sebagai variable pengukuran untuk penelitian ini.

### 3.3.2.3 Luas Wilayah

#### a. Definisi Konseptual

Dalam perencanaan pembangunan dikenal beberapa istilah atau konsep penting yang terkait dengan luasan permukaan dimana pembangunan dilaksanakan. Yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah luas kota dan kabupaten di Indonesia.

#### b. Definisi Operasional

Untuk pengukuran variable luas wilayah dapat dilihat langsung pada situs kementerian dalam negeri yang dapat diunduh langsung dalam situs resmi. Dalam penelitian ini pengukuran variable yang diambil ialah semua luas kota dan kabupaten yang ada di Indonesia.

### 3.4 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Sekaran (2003:265) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, kejadian atau sesuatu yang menarik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yang menyerahkan laporan keuangan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, dimana sampel penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

- A. Daerah yang menyerahkan laporan realisasi anggaran minimal laporan realisasi anggaran dan perencanaan anggaran tahun 2009-2010.
- B. Mempunyai kelengkapan data yang diperlukan untuk pengukuran variable, yaitu : mempunyai data pinjaman daerah untuk tahun 2009 dan 2010 sebagai variabel utama dalam penelitian ini.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengunduhan melalui situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data untuk laporan realisasi keuangan daerah berupa pendapatan, belanja, pembiayaan dan juga APBD pada tahun 2009-2010 seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Sementara itu untuk luas wilayah, data diambil dari kementerian dalam negeri yang diunduh melalui web resmi.

### **3.6 Metode analisis**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier ialah ialah:

#### **3.6.1 Statistik Deskriptif**

Menurut Ghozali (2011 :19) , statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi,

maksimum dan minimum. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan menggunakan program SPSS 19.

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011 : 160). Pada prinsip nya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal.

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi tidak normal. maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dalam uji ini menggunakan 3 metode yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot) dan analisis statistik (analisis skewness dan kurtosis) dan juga one sample Kolmogorov-Smirnov Test.

#### **3.6.2.2 Uji Multikolinearitas**

Penggunaan beberapa variable bebas memungkinkan terjadinya multikolinearitas. Menurut Nachrowi (2006:95). Uji multikolonieritas

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Multikolinearitas adalah hubungan linear antara variable bebas. Dalam membuat model regresi berganda, variable bebas yang baik adalah variable bebas yang mempunyai hubungan dengan variable terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan variable bebas lainnya. jika ada variable bebas yang berkorelasi sudah pasti setiap perubahan suatu variable bebas akan merubah variable bebas lainnya. Ada beberapa cara mendeteksi multikolinearitas , antara lain :

#### A. *Variance Inflation Factor* dan *Tolerance*

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)

- 1) Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau nilai VIF  $< 10$  artinya mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.
- 2) Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau nilai VIF  $> 10$  artinya mengindikasikan terjadi multikolonieritas.

#### 3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011: 139). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat scatter plot (nilai prediksi dependen

ZPRED dengan residual SRESID), uji Gletjer, uji Park, dan uji White. Analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karna jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting oleh sebab itu uji statistik yang lebih untuk menjamin keakuratannya. Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Model regresi dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%

#### 3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Nachrowi (2006:183) autokorelasi secara harfiah dapat disebut sebagai korelasi yang terjadi antara observasi dalam satu variable. Autokorelasi dapat terjadi jika adanya observasi yang berturut-turut sepanjang waktu mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). dengan adanya uji autokorelasi ini diharapkan *error* tidak saling berkorelasi antara satu observasi dengan observasi lainnya. Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi yaitu dengan menggunakan *Uji Durbin Watson* (DW). Koefisien autokorelasi mempunyai nilai  $-1 \leq p \leq 1$  sedangkan nilai statistic *Durbin Watson* yaitu  $0 \leq d \leq 4$ , sehingga dapat diartikan bahwa :

- A. Jika statistic DW bernilai 2, maka  $p$  akan bernilai 0 yang berarti tidak ada autokorelasi.

- B. Jika statistic DW bernilai 0, maka p akan bernilai 1, yang berarti ada autokorelasi positif.
- C. Jika statistic DW bernilai 4, maka p akan bernilai -1, yang berarti ada autokorelasi negatif.

### 3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui arah hubungan apakah terdapat hubungan positif atau negatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang mengalami kenaikan atau penurunan.

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 PD + \beta_3 LW + e$$

Keterangan:

**BM** = Belanja Modal

**$\alpha$**  = Konstanta

**PAD** = Pendapatan asli daerah

**PD** = Pinjaman Daerah

**LW** = Luas Wilayah

**$\beta$**  = Koefisien regresi

**e** = Error

### 3.6.4 Uji Hipotesis

#### 3.6.4.1 Pengujian Simultan (Uji-F)

Nachrowi (2006: 20) menyatakan bahwa uji-F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan. Hasil dari  $F_{hitung}$  akan dibandingkan dengan  $F_{tabel}$ . Jika  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  maka ada hubungan yang signifikan antara variable independent dengan variable dependent.

#### **3.6.4.2 Pengujian Parsial (Uji-t)**

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka selanjutnya menghitung koefisien regresi secara individu (Nachrowi, 2006). Uji-t bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan masing-masing variable independent terhadap variable dependent dengan asumsi variable lainnya konstan. Hasil dari  $T_{hitung}$  akan dibandingkan dengan  $T_{tabel}$ . Jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$  maka hipotesis nol ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa variable independent dengan variable dependen berpengaruh secara parsial.

#### **3.6.4.3 Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (*Goodness of Fit*) yang dinotasikan dengan  $R^2$ , suatu ukuran yang penting dalam regresi untuk menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi (Nachrowi, 2006). Menurut nachrowi (2006), koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa dekatnya garis regresi yang terestimasi dengan data yang sesungguhnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Unit Analisis/Observasi

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dalam menganalisa dan menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal. Objek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia dengan data penelitian laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2009 dan 2010. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan yaitu:

1. Daerah yang menyerahkan laporan realisasi anggaran minimal laporan realisasi anggaran dan perencanaan anggaran tahun 2009 dan 2010.
2. Daerah yang menerima pinjaman daerah pada tahun 2009 dan 2010.
3. Mempunyai kelengkapan data yang diperlukan untuk pengukuran variabel.

Tabel 4.1  
Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia	509
Pemerintah daerah yang tidak melakukan pinjaman daerah pada tahun 2009 dan 2010	(481)
Jumlah Sampel	28

Sumber: Data diolah oleh penulis

Hasil *sampling* berjumlah 28 pemerintah daerah yang dapat diolah untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil *sample* tersebut didapat dari kriteria yang

telah ditentukan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan analisis statistik. Pengujian hipotesis menggunakan statistik melalui program SPSS 19.0. Hasil analisis memberikan informasi apakah pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

Dikarenakan peneliti mengambil waktu penelitian selama dua tahun yaitu tahun 2009 dan 2010 maka berdasarkan jumlah sampel tersebut akan menghasilkan jumlah obeservasi pengamatan sebanyak 56 observasi. Nama-nama pemerintah daerah sampel dapat dilihat pada Lampiran 1.

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari variabel. Dengan melakukan uji ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai penelitian seperti nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Statistik deskriptif dari 56 observasi pemerintah daerah yang dijadikan sebagai sample dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel 4.2  
Uji Statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	56	474,90	2208,53	1259,7791	421,96423
PAD	56	113,90	7644,10	631,0355	1005,36540
PD	56	,10	651,37	127,7777	161,22300
LW	56	44,00	61493,00	4643,5357	11491,48169
Valid N (listwise)	56				

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2013

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal

Belanja Modal memiliki nilai rata-rata sebesar 1259,7791 atau sekitar Rp.125.977.910.000. Hal tersebut menjelaskan bahwa alokasi belanja modal rata-rata kabupaten dan kota yang dijadikan sample hanya sekitar 22% dari anggaran belanja pemerintah daerah. Hal ini juga menunjukkan anggaran untuk alokasi belanja modal belum menjadi prioritas pemerintah daerah yang mana seharusnya adalah 30% sampai 50% dari anggaran belanja pemerintah daerah. Belanja Modal tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Barru pada tahun 2009 dengan nilai belanja modal Rp.220.853.237.638 atau Rp.2208,53 dalam ratusan juta rupiah, hal ini dikarenakan Kabupaten Barru ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) yang mana menuntut pemerintah Kabupaten Barru untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur ekonomi yang memadai, sementara itu belanja modal terendah dimiliki oleh Kabupaten Maros tahun 2010 dengan nilai belanja modal Rp.47.490.021.800 atau Rp.474,90 dalam ratusan jutaan rupiah, hal ini disebabkan karena pada tahun 2009, Kabupaten Maros memiliki permasalahan mengenai dana yang mana mengakibatkan alokasi anggaran belanja modal untuk tahun 2010 dianggarkan dengan porsi yang kecil. Permasalahan tersebut ialah utang yang tidak dibayarkan di tahun 2009, kemudian baru diajukan kembali pada tahun 2010. Hal ini membuat porsi untuk alokasi belanja modal pada tahun 2010 berkurang. Standar deviasi untuk belanja modal sebesar 421,96423.

## 2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 631,0355 atau sekitar Rp.63.103.550.000. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan asli dari daerah yang dimiliki oleh kabupaten atau kota di Indonesia sekitar 11% dari total pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan belanjanya. Pendapatan asli daerah terbesar dimiliki oleh Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2010 sebesar Rp.764.410.452.000 atau Rp.7.644,10 dalam ratusan juta rupiah, hal ini disebabkan karena kabupaten Pematang Jaya menambahkan infrastruktur pelayanan publik yang mana berimbas kepada peningkatan pendapatan asli daerah, sementara itu pendapatan asli daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Sekeloa pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp.11.390.371.398 atau Rp.113,90 dalam ratusan juta rupiah, hal ini disebabkan karena tidak taatnya wajib pajak dalam membayar pajak PBB, dari 87 desa di kabupaten sekeloa, hanya 3 desa yang warganya sudah 100% membayar PBB. Standar deviasi pendapatan asli daerah sebesar 1005,36540.

## 3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 127,7777 atau sekitar Rp.12.777.770.000. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata daerah meminjam hanya 12,5% dari total penerimaan pembiayaan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah bukan merupakan prioritas utama penerimaan bagi

pemerintah daerah. Pinjaman daerah tertinggi sebesar Rp.60.000.000.000 atau Rp.600,00 dalam ratusan juta rupiah dimiliki oleh Kabupaten Landak pada tahun 2010. Jika melihat laporan realisasi anggaran tahun 2010, pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh kabupaten landak, masih dibawah rata-rata pendapatan asli daerah pada umumnya, hal ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Landak menerima sumber pendapatan lain yang lebih besar yaitu pinjaman daerah untuk membiayai kebutuhan ekonomi daerah tersebut guna mencukupi pembiayaan belanja daerah. Sementara itu pinjaman daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Serang 2009 dengan nilai pinjaman daerah sebesar Rp.10.381.702 atau sebesar Rp 0,10 dalam jutaan rupiah, hal ini dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran yang mana pendapatan asli daerah untuk kabupaten serang diatas rata-rata pendapatan asli daerah pada umumnya, hal ini mengindikasikan bahwa PAD yang dimiliki oleh kabupaten serang sudah cukup untuk membiayai belanja daerah sehingga tidak membutuhkan pinjaman daerah yang besar untuk membiayai kebutuhan ekonomi daerah. Standar deviasi pinjaman daerah sebesar 161,22300

#### 4. Luas Wilayah

Luas wilayah memiliki nilai rata-rata sebesar 4643,5357, dengan standar deviasi sebesar 11491,48169. Luas wilayah tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Jayapura dengan nilai 61.493 km. Kabupaten Jayapura sangat besar karna berhasil memekarkan beberapa wilayahnya menjadi kotamadya maupun beberapa Kabupaten Pemekaran, sementara itu luas

wilayah terendah dimiliki oleh Kota Surakarta dengan nilai 44 km. Karna daerah ini belum mengalami pemekaran daerah. Ide pemekaran daerah Kota Surakarta masih dalam proses kajian.

#### **4.2.2 Uji Asumsi Klasik**

##### **4.2.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji *Skewness* dan *Kurtosis*, uji *Normal Probability Plot* dan uji *kolmogorov smirnov*.

Untuk memperjelas sebaran data agar tidak terdapat bias hal pertama yang dilakukan adalah dengan menggunakan uji normalitas *Skewness* dan *Kurtosis*. Cara menganalisis uji ini dengan cara membagi nilai rasio *skewness* dengan standar *error* rasio *skewness* serta membagi nilai rasio kurtosis dengan standar *error* kurtosis dari data residual. Jika nilai dari hasil pembagian tersebut berada diantara  $\pm 1,96$  untuk tingkat signifikansi 5% maka dapat dinyatakan bahwa data residual tersebut berdistribusi normal dan jika hasil pembagian data tersebut diluar antara nilai  $\pm 1,96$  untuk tingkat signifikansi 5% maka dapat dikatakan data tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.3  
Uji Rasio Skewness Dan Kurtosis

Descriptive Statistics					
	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	56	,177	,319	-,427	,628
Valid N (listwise)	56				

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2013

Jika nilai dari hasil pembagian tersebut berada diantara  $\pm 1,96$  untuk tingkat signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut berdistribusi normal dan jika hasil pembagian data tersebut diluar antara nilai  $\pm 1,96$  untuk tingkat signifikansi 5% maka dapat dikatakan data tersebut tidak berdistribusi normal.

Dari tabel di atas maka dapat diketahui nilai rasio *skewness* dan rasio *kurtosis* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Skewness} &= \text{nilai skewness} / \sqrt{(6/n)} \\ &= 0.177 / \sqrt{(6/56)} \\ &= 0.54 \end{aligned}$$

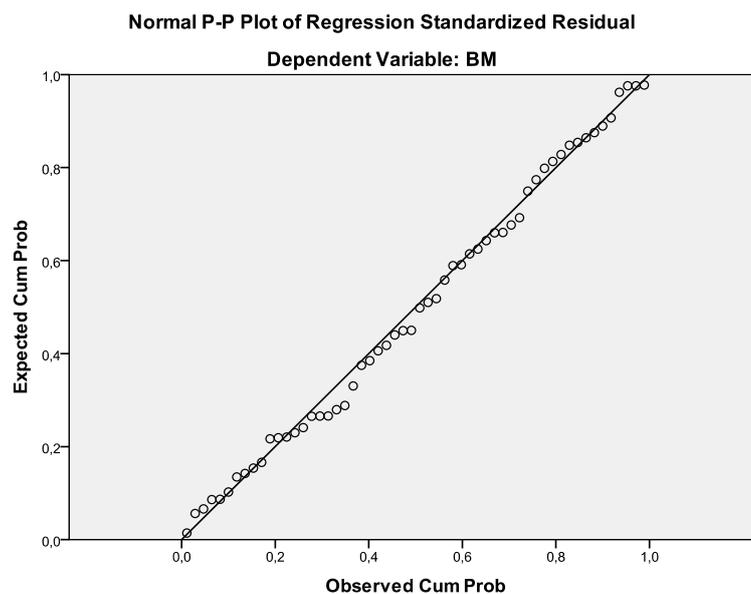
$$\begin{aligned} \text{Rasio Kurtosis} &= \text{nilai kurtosis} / \sqrt{(56/n)} \\ &= -0.427 / \sqrt{(24/56)} \\ &= -0.65 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio *skewness* dan rasio *kurtosis* mempunyai nilai berturut-turut sebesar 0.54 dan -0.65. Nilai-nilai tersebut berada diantara  $\pm 1,96$  yang berarti data penelitian berdistribusi normal.

Selain itu untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal maka dapat dilakukan Uji *Normal*

*Probability Plot* di mana dalam uji ini data berdistribusi normal jika titik-titik pada grafik *normal plot* menyebar tidak menjauhi garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 4.1 Uji *Probability Plot*



Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2013

Selain menggunakan uji normalitas dengan menggunakan nilai dari rasio *skewness* dengan rasio *kurtosis* kemudian melihat uji *Probability Plot*, pengujian normalitas dapat menggunakan uji statistik non-parametrik *kolmogorov smirnov*. Hasil uji *kolmogorov smirnov* dapat dilihat ditabel berikut 4.4. Dari hasil uji *kolmogorov* didapatkan bahwa *asympt.sig* sebesar 0,918 hal ini menunjukkan bahwa data yang ada terdistribusi dengan normal karna lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.4  
Uji *Kolmogorov Smirnov*

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	379,67979305
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,037
Kolmogorov-Smirnov Z		,555
Asymp. Sig. (2-tailed)		,918

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2013

#### 4.2.2.2 Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$ . Berikut adalah hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan:

Tabel. 4.5  
Hasil Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	,923	1,084
	PD	,933	1,072
	LW	,988	1,012

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2013

Dari tabel 4.5 dapat dipastikan bahwa variabel dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas karena nilai VIF dari tiap variabel masih berada  $< 10$  dengan nilai toleransi  $> 0,1$ .

#### 4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk melihat apakah terdapat masalah heterokedastisitas atau tidak, salah satunya dengan menggunakan uji *gletser*. Jika hasil signifikansi berada diatas 5% maka dapat disimpulkan bahwa varabel-variabel tersebut sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel. 4.6  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	348,332	47,604		7,317	,000
	PAD	-,036	,031	-,168	-1,182	,243
	PD	-,161	,190	-,120	-,848	,400
	LW	,001	,003	,043	,311	,757

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2013

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya berada lebih besar dari 5%.

#### 4.2.2.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Dalam penelitian ini uji yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah dengan menggunakan *durbin watson*, yaitu dengan menggunakan angka *durbin watson* yang didapat dari hasil pengujian, kemudian dibandingkan dengan tabel *durbin watson*. Berikut adalah tabel hasil dari uji *durbin watson*.

Tabel 4.7  
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,436 <sup>a</sup>	,190	,144	390,47853	2,009

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2013

Berdasarkan table 4.7, hasil pengujian *Durbin-Watson* di dapat nilai  $dl=1.4581$  dan  $du=1.6850$  sehingga nilai  $4-dl=2.5419$  dan  $4-du=2.315$ . Nilai  $d$  (2.009) terletak diantara  $du$  dan  $4-du$  ( $1.6850 < d < 2.315$ ) yang berarti model regresi terbebas dari masalah autokorelasi.

### 4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat melakukan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda, dapatkan hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 4.8  
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficient	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1185,227	84,727
	PAD	-,082	,055
	PD	,739	,338
	LW	,007	,005

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2013

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8, dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 1185,227 - 0.082PAD + 0.739PD + 0.007LW + e$$

Dimana :

Y = Alokasi Belanja Modal

$X_1$	= Pendapatan Asli Daerah
$X_2$	= Pinjaman Daerah
$X_3$	= Luas Wilayah
$e$	= <i>Error</i>

Dari persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar Rp 1.185,227 atau setara dengan Rp.118.522.700.000, artinya pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dan luas wilayah tetap (konstan) maka alokasi belanja modal adalah sebesar Rp.1.185,227 dalam ratusan juta rupiah. Hal tersebut menandakan alokasi belanja modal tetap akan terjadi sebesar Rp.118.522.7000 pada kota atau kabupaten pada periode 2009 dan 2010.
2. Koefisien variabel pendapatan asli daerah sebesar -0.082, artinya ketika pendapatan asli daerah meningkat 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai 0 maka alokasi belanja modal akan menurun sebesar 0,082. Angka tersebut dapat diasumsikan setiap peningkatan pendapatan asli daerah Rp.1.000 diprediksi akan menurunkan alokasi belanja modal Rp.82. Koefisien bertanda negatif yang berarti apabila pendapatan asli daerah bertambah maka alokasi belanja modal akan berkurang.
3. Koefisien pinjaman daerah sebesar 0,739, artinya ketika pinjaman daerah meningkat 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai 0 maka alokasi belanja modal akan meningkat sebesar 0,739. Angka tersebut dapat diasumsikan setiap peningkatan pinjaman daerah Rp.1.000 diprediksi akan meningkatkan alokasi belanja modal Rp.739. Koefisien bertanda

positif yang berarti apabila pinjaman daerah bertambah maka alokasi belanja modal pada kabupaten atau kota juga akan bertambah.

4. Koefisien variabel luas wilayah sebesar 0,007, artinya ketika luas wilayah meningkat 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai 0 maka alokasi belanja modal akan meningkat sebesar 0,007. Angka tersebut dapat diasumsikan setiap peningkatan luas wilayah 1.000 km diprediksi akan meningkatkan alokasi belanja modal Rp.7. Koefisien bertanda positif yang berarti semakin besar luas wilayah suatu daerah, maka alokasi untuk belanja modal juga semakin besar.

#### **4.4 Pengujian Hipotesis**

Uji regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji ini dalam penelitian ini yaitu uji T dan uji F.

##### **4.4.1 Uji Statistik t dan F**

Uji t digunakan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji Statistik t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran yang dipakai adalah dengan menggunakan perbandingan  $t_{tabel}$  dengan  $t_{hitung}$ . Untuk itu dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat.

$H_a$  : variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat.

Jika  $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak atau bila  $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan derajat kepercayaan 5%  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2.006 Berikut adalah tabel hasil dari uji T:

Tabel. 4.9  
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1185,227	84,727		13,989	0
PAD	-0,082	0,055	-0,195	-1,502	0,139
PD	0,739	0,338	0,282	2,186	0,033
LW	0,007	0,005	0,186	1,485	0,143

#### a. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan ( $H_1$ ) pada penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Indonesia periode tahun 2009 dan 2010. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, variabel pendapatan asli daerah memiliki  $t_{\text{hitung}} = -1,502$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,139. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$  ( $2,006 > 1,502$ ) dan nilai signifikansi variable  $0,139 > 0,05$ . Sehingga hipotesis yang diajukan ( $H_1$ ) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.

#### b. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan ( $H_2$ ) pada penelitian ini menyatakan bahwa pinjaman daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

kabupaten dan kota di Indonesia periode tahun 2009 dan 2010. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, pinjaman daerah memiliki  $t_{hitung} = 2,186$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,033. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{tabel} < t_{hitung}$  ( $2,006 < 2,186$ ) dan nilai signifikansi variabel  $0,033 < 0,05$ . Sehingga hipotesis yang diajukan ( $H_2$ ) diterima dan dapat disimpulkan bahwa pinjaman daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

**c. Pengujian Hipotesis 3**

Hipotesis ketiga yang diajukan ( $H_3$ ) pada penelitian ini menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Indonesia periode tahun 2009 dan 2010. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, luas wilayah memiliki  $t_{hitung} = 1,485$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0.143. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{tabel} > t_{hitung}$  ( $2,006 > 1,485$ ) dan nilai signifikansi variabel  $0,143 > 0,05$ . Sehingga hipotesis yang diajukan ( $H_3$ ) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa luas wilayah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.

**d. Pengujian Hipotesis 4**

Selain uji T, dalam analisis regresi berganda juga diperlukan sebuah pengujian untuk menguji variabel-variabel penelitian secara simultan atau bersama-sama. Selain itu uji F ini juga akan menguji hipotesis yang keempat. Hipotesa akan diterima apabila  $F_{tabel} > F_{hitung}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak atau bila  $F_{tabel} < F_{hitung}$  maka  $H_a$

diterima dan  $H_0$  ditolak dengan tingkat kesalahan 5% maka  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 2,79. Berikut adalah tabel hasil uji F:

Tabel. 4.10  
Hasil Uji F

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1864338,757	3	621446,252	4,076	,011 <sup>a</sup>
	Residual	7928620,989	52	152473,481		
	Total	9792959,746	55			

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2013

Berdasarkan tabel di atas maka disimpulkan dengan tingkat kesalahan 5%, semua variabel bebas secara simultan signifikan berpengaruh positif secara statistik pada alokasi belanja modal. Ini dapat dilihat dari nilai  $F_{\text{tabel}} < F_{\text{hitung}}$  ( $2,79 < 4,076$ ) dan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,011 nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  yang sebesar 0,05 atau 5%. Dengan demikian hipotesis  $H_4$  diterima. Hal ini berarti pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

#### 4.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabel-variabel independen mampu memprediksi variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinan berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mempredksi variasi variabel independen. Berikut tabel hasil output dari uji koefisien determinasi.

Tabel. 4.11  
Hasil Koefisien Determinan

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,436 <sup>a</sup>	,190	,144	390,47853	2,009

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2013

Dari tabel di atas dapat terlihat hasil *adjusted R*<sup>2</sup> dari variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebesar 0,144. Hal ini berarti bahwa 14,4% dari alokasi belanja modal dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan 85,6% lainnya dijelaskan oleh faktor lainnya diluar model regresi. Dalam hal ini faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini adalah sumber penerimaan lain yang berasal dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pemerataan pendapatan.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Pendapatan asli daerah menunjukkan hasil yang negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis H<sub>1</sub> sehingga hipotesis H<sub>1</sub> ditolak. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Rizanda (2010) yang menyatakan PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa besarnya PAD yang diperoleh oleh suatu kota atau kabupaten tidak mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal untuk kabupaten dan kota. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang pengelolaannya berdasarkan

kewenangan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini , pemerintah pusat hanya menentukan secara umum alokasi PAD untuk belanja modal, untuk lebih spesifik , pemda lah yang harus menentukan. Besarnya kontribusi PAD untuk belanja daerah yaitu sebesar 10% hingga 50%. Hal ini menandakan bahwa PAD juga dapat digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah termasuk belanja modal akan tetapi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah yang bersangkutan, karna prioritas pembangunan suatu daerah didasarkan pada kebutuhan daerah yang bersangkutan. Menurut Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, menyatakan bahwa dana pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki prioritas yang berbeda dalam hal pembangunan daerah, karna setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kegiatan belanja disuatu organisasi tentu saja disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan. Dalam konsep *matching cost revenue*, bahwa suatu pengeluaran didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan. Akan tetapi penelitian ini mengindikasikan bahwa besarnya PAD tidak menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja operasional dari pada membiayai belanja modal. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu kabupaten atau kota belum tentu dapat menaikkan anggaran untuk alokasi belanja modal dikarna kan pemerintah daerah memiliki alokasi belanja lain yang harus diprioritaskan. Hasil ini didukung oleh teori yang dikemukakan

oleh Mardiasmo, yaitu adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai *trade off* karena sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang lain. Jika dilihat dari laporan realisasi anggaran, pemerintah daerah mempunyai tiga kewajiban belanja yaitu, belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Karena terbatasnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sementara beban belanja terus meningkat, pemerintah pusat memberikan sumber dana lain untuk dikelola oleh pemerintah daerah dari pendapatan APBN yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam laporan APBD rata-rata sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan pengalokasian anggaran belanja modal tidak hanya bersumber dari PAD saja melainkan dari dana perimbangan yang digunakan untuk membiayai pemerataan antar kabupaten dan kota di Indonesia.

Semua penerimaan daerah dari PAD dapat digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan masing-masing daerah tergantung dari kebijakan pemerintah daerah yang dimanifestasikan dalam alokasi belanja modal. Sebab pada dasarnya alokasi belanja yang disusun, mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas, dan program-program setiap tahun dari daerah yang bersangkutan. Untuk itu jika belanja operasional semakin meningkat, hal ini akan berdampak pada penentuan

alokasi belanja modal karna terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan untuk belanja modal semakin menurun. Hal ini membuat pemerintah daerah menurunkan proporsi untuk belanja modal.

#### **4.5.2 Pengaruh Pinjaman Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Pinjaman daerah menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini sesuai dengan hipotesis  $H_2$  yang mengatakan pinjaman daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sehingga hipotesis  $H_2$  diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhatt dan Antra (2010) yang menyatakan bahwa pinjaman daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Meningkatnya tambahan pembiayaan aset dari pinjaman dapat mempermudah pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja modal. Hasil ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Renyowijoyo yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman untuk membiayai kegiatan pemerintahannya termasuk membiayai belanja modal. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam hal belanja tetapi hal ini tergantung dari keinginan daerah yang bersangkutan karena pinjaman daerah merupakan inisiatif dari pemerintah daerah yang berkepentingan untuk melakukan pinjaman. Jika suatu daerah beranggapan kondisi financial nya belum tercukupi, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman untuk kegiatan program yang ingin dijalankan salah satunya meningkatkan alokasi untuk belanja modal.

Untuk itu penggunaan pinjaman suatu daerah sangat tergantung dari sasaran strategis yang ingin dicapai oleh kabupaten atau kota masing-masing.

#### **4.5.3 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap alokasi Belanja Modal**

Luas wilayah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini tidak sesuai dengan  $H_3$  yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal suatu kota atau kabupaten, sehingga  $H_3$  ditolak. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siswantoro Dodik (2012) yang menyatakan luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal suatu kota atau kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian ini, daerah yang memiliki kota atau kabupaten yang lebih besar tidak memiliki alokasi yang lebih besar untuk pengalokasian belanja modal sebagai sarana pembangunan untuk meningkatkan pembiayaan, pemeliharaan, sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini belum memaksimalkan ruang wilayah dari daerah itu sendiri. Menurut Adisasmita (2010) dalam perencanaan pembangunan, luas wilayah merupakan konsep penting dimana pembangunan dilaksanakan, tetapi pada kenyataannya masih banyak daerah yang belum memaksimalkan tata ruang daerahnya. Maksimalisasi ruang wilayah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang mana akan berdampak pada peningkatan perekonomian, untuk itu memaksimalkan ruang wilayah sangat berpengaruh untuk perkembangan pembangunan daerah.

Menurut UU No.32 tahun 2004, dalam Renyowijoyo menyatakan bahwa salah satu kewajiban dari pemerintah daerah adalah menyusun

perencanaan tata ruang daerah yang mana menurut PP 26 tahun 2008 perencanaan tata ruang adalah adalah pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Pemanfaatan ruang wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (built-up area) terhadap total wilayah. Tata ruang daerah harus dimaksimalisasikan untuk pembangunan daerah yang mana untuk mendukung pembangunan dibutuhkan anggaran dari belanja modal yang memadai. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatarajasa dalam Koran ekonomi dan bisnis, lebih dari 400 infrastruktur terbengkalai. Hal ini berdampak pada terhambatnya perekonomian daerah karna konsep pembangunan daerah sangat penting guna memaksimalisasikan daya guna daerah.

#### **4.5.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Pengaruh pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dan luas wilayah secara simultan berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap alokasi belanja modal. Hal ini sesuai dengan  $H_4$ , sehingga  $H_4$  diterima. Hasil uji koefisien determinasi merupakan uji yang menjadi landasan diterimanya  $H_4$ . Pada uji tersebut, hasil *adjusted*  $R^2$  yang menjadi tolak ukur pengaruh variabel independen secara simultan menunjukkan hasil 0,144. Hal ini mengandung makna bahwa sebanyak 14,4% variabel dependen dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen, sedangkan 85,6% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dan tidak diteliti berdasarkan model regresi penelitian ini. Dalam hal ini faktor lain

yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini adalah sumber penerimaan lain yang berasal dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang berarti bahwa pendapatan asli daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Jika visi dan misi daerah yang bersangkutan memilih anggaran untuk belanja modal diutamakan, pemerintah daerah dapat membiayai belanja modal dari hasil pendapatan asli daerahnya.

Pinjaman daerah dapat digunakan sebagai pembiayaan alternatif untuk membiayai belanja modal, hal ini dikarenakan jika pemerintah daerah merasa pendapatan asli daerahnya belum mampu membiayai pengeluaran belanja modal, pemerintah daerah dapat memilih alternatif pinjaman daerah sebagai pembiayaan untuk anggaran belanja modal.

Luas wilayah juga berperan sebagai indikator besarnya belanja modal. Kebutuhan daerah yang lebih besar akan sarana dan prasarana membutuhkan dukungan dari anggaran belanja modal. Adanya kombinasi dari pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah akan meningkatkan porsi untuk alokasi belanja modal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal. Periode penelitian dalam penelitian ini yaitu 2009 dan 2010 dengan sampel penelitian yaitu laporan realisasi pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:.

1. Pendapatan asli daerah negatif berpengaruh terhadap alokasi belanja modal hal ini ditunjukkan oleh analisis regresi linier berganda tetapi dalam uji parsial variabel ini hanya memiliki  $t_{hitung} = -1,502$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,139 , hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal tetapi memiliki pengaruh yang sangat kecil. Karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah sementara beban untuk belanja lainnya semakin meningkat membuat pemerintah harus memprioritaskan belanja operasional dibandingkan belanja modal. Hal ini yang mengakibatkan pendapatan asli daerah tidak menjadi salah satu faktor yang penentu untuk alokasi belanja modal.
2. Pinjaman daerah memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap alokasi belanja modal dengan  $t_{hitung} = 2,186$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,033.

Hal ini dapat dijelaskan karena meningkatnya tambahan pembiayaan aset dari pinjaman daerah dapat mempermudah alokasi anggaran pemerintah daerah yang mana akan meningkatkan alokasi belanja modal.

3. Luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal hal ini dapat ditunjukkan oleh analisis regresi linier berganda, tetapi dalam uji parsial variabel ini hanya memiliki  $t_{hitung} = 1,485$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,143, hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah mempengaruhi belanja modal tetapi memiliki pengaruh yang sangat kecil. Masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan kebijakan tata ruang yang dapat dimanfaatkan untuk investasi. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa daerah yang memiliki luas wilayah yang besar belum tentu memaksimalkan potensi pembangunan di daerahnya sehingga luas wilayah bukan merupakan penentu dari anggaran untuk alokasi belanja modal.
4. Secara simultan pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dan luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Variabel-variabel independen yang diajukan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan luas wilayah mampu menjelaskan variabel dependen yaitu belanja modal sebesar 14,4%. Sedangkan sisanya sebesar 85,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Sampel yang tersedia hanya 28 pemerintah daerah kabupaten dan kota dari 509 kabupaten dan kota. Hal ini dikarena penelitian ini memiliki variabel pinjaman daerah yang mana tidak semua kabupaten dan kota memilih pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaannya. Penelitian ini hanya dapat berfokus pada daerah yang memiliki pinjaman dalam suatu daerah, sehingga tidak mencakup seluruh populasi di Indonesia. Selain itu penambahan tahun membuat peneliti mengurangi jumlah sampel karena daerah yang memiliki pinjaman daerah berturut-turut selama dua tahun sangatlah terbatas.

## **5.3 Saran Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

- a. Bagi peneliti berikutnya:
  1. Peneliti selanjutnya diharapkan memfokuskan pada daerah yang sebagian besar kabupaten dan kotanya melakukan pinjaman daerah.
  2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variable lain dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dan tidak berfokus pada variable pinjaman daerah.
  3. Peneliti selanjutnya dapat mengurangi jangka waktu penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang lebih mencerminkan keseluruhan populasi di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah:

Diharapkan pemerintah memperhatikan alokasi untuk belanja modal yang mana akan memberikan manfaat untuk meningkatkan taraf perekonomian dari daerah itu sendiri sehingga dapat memajukan perekonomian daerah. Selain itu diharapkan pemerintah pusat merealisasikan batas maksimal untuk belanja modal dan batas minimum untuk belanja pegawai sehingga tidak terjadi perbedaan yang sangat besar untuk belanja modal antara kabupaten atau kota yang satu dengan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Adji. 2011. *Transportasi Dan Pengembangan Wilayah* : Graham Ilmu. Yogyakarta.
- Bringham, Eugene F. Joel F Houston. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11 Buku 2. Penerjemah : Ali Akbar Yulianto. Jakarta : Salemba Empat.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) (diakses pada tanggal 3 April 2013)
- Ghazali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Sektor Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Istijanto. 2005. *Sumber Daya Manusia*. Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi. Jakarta.
- Kompas. [www.kompas.com/read/2011/06/23/09220299/](http://www.kompas.com/read/2011/06/23/09220299/) (Diakses pada 23 Maret 2013)
- Kompas. [www.tekno.kompas.com/80.persen.dana.apbd.untuk.gaji.pegawai](http://www.tekno.kompas.com/80.persen.dana.apbd.untuk.gaji.pegawai) (Diakses pada 11 Maret 2013)
- Lora, Eduardo dan Mauricio Olivera. 2006. *Public Debt and Social Expenditure: Friends or Foes?. Inter-American Development Bank*. Washington.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik* : Penerbit Andi Yogyakarta.
- Muindro, Renyowijoyo. 2010. *Akuntansi Sektor Public Organisasi Non Laba : Mitra Wacana Medika*.
- Nachrowi, D Nachrowi. Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan* : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Permen No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ratna, Rizanda. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Propinsi Jawa Timur*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business A Skill Building Approach*. Edisi 4.

Siswanto, Dodik. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia. Depok.

Sulistyowati, Diah. 2011. *Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Belanja modal*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Sumarni, Septaningsih. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta*. Akmenika UPY, Volume 4, 2009.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

## Lampiran 1

### Nama kota dan kabupaten yang dijadikan sampel

		PAD	BM	PD	LW
2009	Kab. Brebes	80,275,021,213	130,717,311,894	2,000,000,000	1,661
2010	Kab. Brebes	71,025,304,600	131,399,494,000	2,000,000,000	1,661
2009	Kab. Demak	50,235,869,718	153,085,933,849	1,500,000,000	900
2010	Kab. Demak	56,756,027,100	126,893,229,000	4,603,000,000	900
2009	Kab. Grobogan	77,079,602,181	97,471,895,670	19,192,924,533	1,976
2010	Kab. Grobogan	78,366,420,800	91,688,215,100	3,677,000,000	1,976
2009	Kab. Pati	90,667,623,139	161,129,015,196	1,750,000,000	1,419
2010	Kab. Pati	112,526,536,000	68,355,050,600	1,600,000,000	1,419
2009	Kab. Pemalang	81,819,333,588	126,532,376,998	3,500,000,000	1,115
2010	Kab. Pemalang	764,410,452,000	77,174,267,000	3,500,000,000	1,115
2009	Kab. Purworejo	60,814,316,979	110,019,923,725	2,250,000,000	1,034
2010	Kab. Purworejo	69,609,314,200	62,069,454,700	2,250,000,000	1,034
2009	Kab. Sragen	72,681,309,220	102,236,972,428	2,000,000,000	941
2010	Kab. Sragen	79,627,347,800	86,363,572,100	1,600,000,000	941
2009	Kab. Sukoharjo	48,842,528,340	54,722,163,432	2,500,000,000	467
2010	Kab. Sukoharjo	64,446,167,300	62,128,063,800	2,500,000,000	467
2009	Kota Surakarta	101,972,318,682	81,881,493,303	721,646,875	44
2010	Kota Surakarta	113,946,007,000	79,762,498,200	825,000,001	44
2009	Kab. Landak	13,254,087,922	180,134,450,406	20,000,000,000	9,909
2010	Kab. Landak	15,380,249,900	177,192,131,000	60,000,000,000	9,909
2009	Kab. Barito Selatan	15,561,181,851	203,954,292,385	8,457,500,000	3,284
2010	Kab. Barito Selatan	12,705,738,200	116,563,992,000	18,880,000,000	3,284
2009	Kab. Sidenreng Rappang	24,563,498,900	158,885,884,433	55,818,399,760	1,883
2010	Kab. Sidenreng Rappang	26,398,315,200	110,301,624,000	31,426,000,001	1,883

2009	Kota Pare-Pare	37,378,318,090	104,149,428,566	14,083,085,287	99
2010	Kota Pare-Pare	45,252,486,000	133,779,819,000	6,209,000,001	99
2009	Kab. Mamuju	14,949,636,414	123,495,314,575	65,136,627,635	11,058
2010	Kab. Mamuju	17,276,123,300	103,677,627,000	25,461,000,001	11,058
2009	Kab. Maros	27,437,789,370	121,391,506,197	18,000,000,000	1,619
2010	Kab. Maros	26,453,736,500	47,490,021,800	21,000,000,000	1,619
2009	Kab. Jepara	71,919,859,343	90,748,385,252	2,500,000,000	1,004
2010	Kab. Jepara	84,713,357,500	119,766,418,000	2,400,000,000	1,004
2009	Kab. Kebumen	63,016,363,174	159,361,410,093	3,000,000,000	1,281
2010	Kab. Kebumen	58,742,305,600	118,771,773,000	3,250,000,000	1,281
2009	Kab. Rembang	56,887,895,318	56,894,049,901	1,500,000,000	1,014
2010	Kab. Rembang	65,699,258,900	92,130,262,100	1,500,000,000	1,014
2009	Kab. Tapin	18,833,719,510	196,393,415,231	586,600,000	2,701
2010	Kab. Tapin	20,737,650,800	196,425,417,000	922,000,001	2,701
2009	Kab. Jayapura	33,953,846,948	188,583,012,613	1,884,465,364	61,493
2010	Kab. Jayapura	26,744,931,800	118,073,883,000	1,907,000,001	61,493
2009	Kota Sorong	22,860,228,529	177,406,005,242	37,000,000,000	1,105
2010	Kota Sorong	26,526,551,700	124,146,911,000	25,000,000,000	1,105
2009	Kab. Banjarnegara	60,636,814,797	77,399,942,303	1,250,000,000	1,097
2010	Kab. Banjarnegara	62,486,768,000	155,214,887,000	1,250,000,000	1,097
2009	Kota Singkawang	22,836,913,984	168,207,116,361	8,500,000,000	504
2010	Kota Singkawang	24,330,714,200	130,939,490,000	30,000,000,000	504
2009	Kab. Sekadau	11,390,371,398	152,003,293,464	15,000,000,000	5,444
2010	Kab. Sekadau	11,997,160,300	181,861,369,000	35,000,000,000	5,444
2009	Kab. Barru	12,604,247,923	220,853,237,638	45,040,466,970	1,175
2010	Kab. Barru	12,918,018,239	99,539,115,074	7,675,265,220	1,175
2009	Kab. Pangkajene	59,176,335,522	187,129,562,363	18,099,606,390	12,363

	dan Kepulauan				
2010	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	52,038,626,803	135,097,312,221	23,462,750,150	12,363
2009	Kab. Pinrang	26,722,938,346	150,414,949,706	27,500,000,000	1,962
2010	Kab. Pinrang	21,008,952,488	127,182,966,267	18,855,000,000	1,962
2009	Kab. Serang	118,585,763,408	136,078,418,171	10,381,702	1,467
2010	Kab. Serang	134,718,556,929	109,500,183,808	20,273,391	1,467

Sumber : djpk.depkeu.go.id

## Lampiran 2

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	56	474,90	2208,53	1259,7791	421,96423
PAD	56	113,90	7644,10	631,0355	1005,36540
PD	56	,10	651,37	127,7777	161,22300
LW	56	44,00	61493,00	4643,5357	11491,48169
Valid N (listwise)	56				

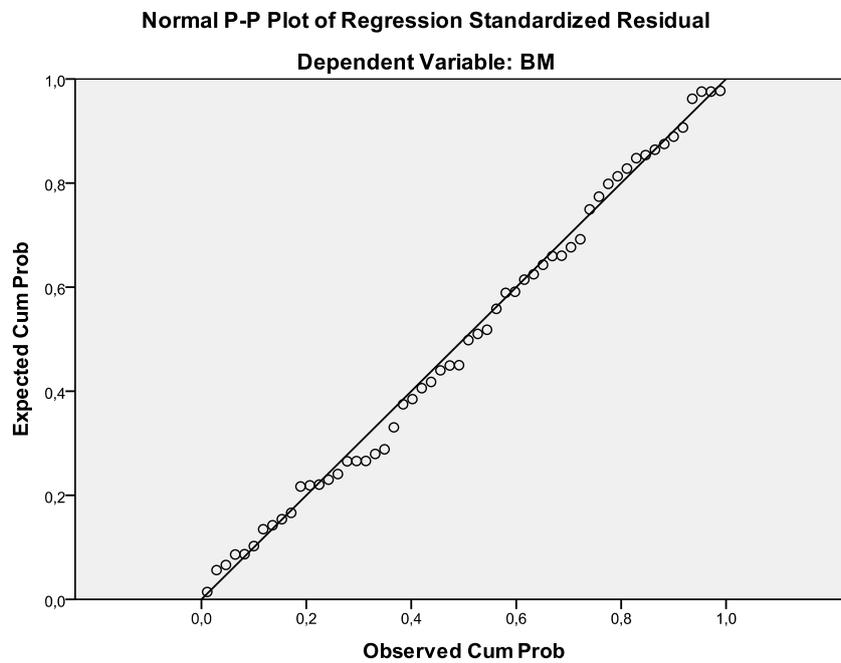
## Lampiran 3

### Hasil Uji Normal dengan *Skewnwss Kurtosis*

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	56	,177	,319	-,427	,628
Valid N (listwise)	56				

## Lampiran 4

### Hasil Uji *Normal Probability Plot*



## Lampiran 5

### Hasil Uji Normal dengan *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	379,67979305
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,037
Kolmogorov-Smirnov Z		,555
Asymp. Sig. (2-tailed)		,918

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Lampiran 6

### Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1185,227	84,727		13,989	,000		
	PAD	-,082	,055	-,195	-1,502	,139	,923	1,084
	PD	,739	,338	,282	2,186	,033	,933	1,072
	LW	,007	,005	,186	1,485	,143	,988	1,012

a. Dependent Variable: BM

## Lampiran 7

### Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	348,332	47,604		7,317	,000
	PAD	-,036	,031	-,168	-1,182	,243
	PD	-,161	,190	-,120	-,848	,400
	LW	,001	,003	,043	,311	,757

a. Dependent Variable: ABSUT

## Lampiran 8

### Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,436 <sup>a</sup>	,190	,144	390,47853	2,009

a. Predictors: (Constant), LW, PD, PAD

b. Dependent Variable: BM

## Lampiran 9

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1185,227	84,727		13,989	,000		
	PAD	-,082	,055	-,195	-1,502	,139	,923	1,084
	PD	,739	,338	,282	2,186	,033	,933	1,072
	LW	,007	,005	,186	1,485	,143	,988	1,012

a. Dependent Variable: BM

## Lampiran 10

### Hasil Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1185,227	84,727		13,989	,000
	PAD	-,082	,055	-,195	-1,502	,139
	PD	,739	,338	,282	2,186	,033
	LW	,007	,005	,186	1,485	,143

a. Dependent Variable: BM

## Lampiran 11

### Hasil Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1864338,757	3	621446,252	4,076	,011 <sup>a</sup>
	Residual	7928620,989	52	152473,481		
	Total	9792959,746	55			

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1864338,757	3	621446,252	4,076	,011 <sup>a</sup>
	Residual	7928620,989	52	152473,481		
	Total	9792959,746	55			

a. Predictors: (Constant), LW, PD, PAD

b. Dependent Variable: BM

## Lampiran 12

### Hasil Uji Hasil Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,436 <sup>a</sup>	,190	,144	390,47853

a. Predictors: (Constant), LW, PD, PAD

b. Dependent Variable: BM

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Nandya Vivi Artantri, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 November 1991. Anak ketiga dari pasangan Yuliardi dan Ety Sofia. Penulis mempunyai dua kakak perempuan dan dua adik perempuan. Alamat tempat tinggal berada di Jalan IR Juanda RT 005 RW 14.

Penulis telah menempuh beberapa tingkat pendidikan formal, yaitu Sekolah Dasar Negri Kemirimuka 3 (1998 - 2003), Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 – Depok (2003 – 2006), Sekolah Menengah Atas Tugu Ibu – Depok (2006 – 2009), serta menjadi mahasiswi Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Angkatan 2009.

Penulis memiliki pengalaman bekerja sebagai mahasiswi PKL di Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara 2012.